



APARATUR

Dewan Minta Bupati Tegur OPD

SEMARAPURA- Meski Pemerintah Kabupaten Klungkung meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) terhadap Laporan Keuangan Daerah (LKPD) untuk tahun anggaran 2016 dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI) Perwakilan Provinsi Bali. Namun pencapaian tersebut bukan berarti tanpa catatan-catatan yang harus dibenahi.

Atas catatan dari BPK tersebut, Ketua DPRD Klungkung Wayan Baru se usai memimpin jalannya sidang Paripurna, Senin (10/7) mendorong Bupati Klungkung untuk menegur, memberikan saran dan arahan yang sifatnya memotivasi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sesuai dengan tingkat, berat ringan dan sifatnya temuan atas laporan hasil pemeriksaan BPK. "Kalau tidak ditegur kan berulang tahun. Bupati berhak menegur bawahan agar kerjanya lebih bagus," ujarnya.

Sementara itu, Bupati Kabupaten Klungkung I Nyoman Suwirta menjelaskan, tak hanya Kabupaten Klungkung, semua kabupaten/kota yang mendapat predikat WTP juga membawa bekal catatan dari BPK. Namun menurutnya, catatan tersebut tidak mengurangi kewajaran laporan keuangan. Yang menjadi catatan tersebut hanya masalah administrasi saja. "Karena asetnya banyak sedangkan administrasinya masih berproses. Seperti PPI Kusamba," terangnya.

Menurutnya, catatan Laporan Keuangan Daerah (LKPD) untuk tahun anggaran 2016, mengalami penurunan yang signifikan dibandingkan tahun sebelumnya. "Kalau tahun sebelumnya itu mencapai 22 catatan. Sedangkan untuk tahun 2016, hanya enam catatan," beber orang nomor satu di Kabupaten Klungkung ini. (ayu/gup)

Edisi : Selasa, 11 Juli 2017

Hal : 28